

ANALISIS POTENSI EKONOMI SEKTORAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 – 2018

Elvis F. Purba¹, Ellia S. Hutabarat²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, Medan
elvispurba63@gmail.com¹, elliasarah14@gmail.com²

Info Artikel

Diterima : 05 Agustus 2020
Revisi : 08 September 2020
Terbit : 22 Desember 2020

Key words:

Economic Potential, Location Quotient (LQ), Base Sector, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Economic Growth, Humbang Hasundutan

Kata Kunci:

Potensi Ekonomi, Location Quotient (LQ), Base Sector, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Economic Growth, Humbang Hasundutan

Corresponding Author :

Elvis F. Purba, E-mail :
Elvispurba63@gmail.com

Abstract

This paper describes the economic potential of each industrial origin Humbang Hasundutan regency period 2010-2018. The analysis is based on: (1) location quotient (LQ), (2) sectoral contribution to GDRP, and (3) sectoral contribution to the regency's economic growth rate. Assuming that there is no a drastic change in the sectoral GDRP value in one or several industrial origin, the annual average value from the observation period is used. Furthermore, to determine the economic potential of each industrial origin based on established quantitative criteria. The results of data analysis indicate that only one industrial origin has high economic potential, namely agriculture, forestry and fisheries. Then there are two industrial origin with moderate potential, i.e.: (1) construction and (2) government administration, defense and compulsory social security. The remaining fourteen other industrial origin have low potential.

Over time, it is estimated that there will be changes in the contribution of each industrial origin to GDRP and the rate of regency economic growth. However, agriculture, forestry and fisheries are estimated to still have high potential in the next few decades, especially since Humbang Hasundutan regency has been designated as one of the food estate for Indonesia.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan potensi ekonomi masing-masing lapangan usaha Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2010-2018. Analisis berdasarkan: (1) *location quotient* (LQ), (2) kontribusi sektoral terhadap PDRB, dan (3) kontribusi sektoral terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut. Dengan anggapan tidak ada perubahan yang drastis dalam nilai PDRB sektoral pada salah satu atau beberapa lapangan usaha, sehingga digunakan nilai rata-rata tahunan dari periode pengamatan tersebut. Selanjutnya untuk menentukan potensi ekonomi masing-masing lapangan usaha didasarkan atas kriteria kuantitatif yang ditetapkan. Hasil analisis data menunjukkan hanya satu lapangan usaha yang memiliki potensi ekonomi yang tergolong tinggi, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian ada dua lapangan usaha yang berpotensi sedang, yaitu: (1) konstruksi dan (2) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sisanya, empat belas lapangan usaha lainnya mempunyai potensi rendah.

Seiring dengan waktu, diperkirakan akan terjadi perubahan-perubahan dalam kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB maupun laju pertumbuhan ekonomi kabupaten. Namun demikian pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan masih tetap memiliki potensi yang tinggi dalam beberapa dasawarsa ke depan, apalagi Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan menjadi salah satu *food estate* bagi Indonesia.

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makroekonomi regional untuk mengetahui perkembangan daerah (Tambunan, 2001; Tarigan, 2006; Purba dan Novita, 2019). Hal ini sejalan dengan BPS (2011: 2) yang menyebut sebagai berikut: "salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)". Artinya berdasarkan data PDRB dapat diketahui berbagai "prestasi" yang dapat diraih suatu daerah meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan prestasi lainnya seiring dengan perjalanan waktu. Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan PDRB per kapita dan lebih jauh lagi, semakin besar PDRB per kapita semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk daerah tersebut (Sukirno, 2014; Sjafrizal, 2018). Demikian juga data PDRB per kapita harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan kemakmuran penduduk dan sekaligus dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan penduduk satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam terminologi ekonomi regional, ekspor merupakan factor pendorong perkembangan ekonomi suatu daerah. Salah satu alat analisis untuk mengidentifikasi lapangan usaha yang mempunyai potensi ekspor, yang dikenal dengan sector basis, adalah analisis *location quotient* (LQ). Lapangan usaha yang mempunyai potensi ekspor ini perlu didorong karena mendatangkan uang dari daerah lain sehingga akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut (Tarigan, 2006; Sjafrizal, 2008; Purba, 2011; Purba dan Simamora, 2016). Biasanya sector basis mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi PDRB sehingga analisis kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pendapatan regional (PDRB) sangat berguna untuk menilai potensi ekonomi masing-masing lapangan usaha tersebut. Selain itu perlu juga menganalisis laju pertumbuhan sehingga potensi ekonomi masing-masing lapangan usaha dapat diketahui, baik untuk tingkat provinsi, maupun kota dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan pendapat Sjafrizal (2018: 229) yang menyatakan bahwa "penentuan potensi ekonomi sektor dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kuosien lokasi, laju pertumbuhan dan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian daerah (PDRB)". Memang benar bahwa pemerintah daerah pun perlu mengetahui lapangan usaha yang memberi kontribusi besar, baik terhadap PDRB maupun terhadap laju pertumbuhan ekonomi sehingga lapangan usaha tersebut perlu diberi perhatian yang lebih besar guna mendorong pertumbuhan lapangan usaha lainnya sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2003, hingga saat ini masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian. Namun seiring dengan dinamika pembangunan, lapangan usaha lain pun mulai berkembang. Pembangunan dan perhatian terhadap berbagai lapangan usaha

tidak terlepas dari visi dan misi pemerintah daerah tersebut mulai dari awal pemekaran hingga saat ini. Prestasi berbagai lapangan usaha turut menjadi perhatian karena kontribusi dan laju pertumbuhannya tidak selalu seiring dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Namun melalui kebijakan yang ditempuhnya, pemerintah dapat mendorong pengembangan beberapa lapangan usaha tertentu yang dianggap memiliki keunggulan dan prospek yang lebih baik untuk dikembangkan, termasuk sector-sector basis.

Dalam dasawarsa 2010-an berbagai upaya telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong perkembangan pembangunan wilayah seputar Danau Toba, tidak terkecuali Kabupaten Humbang Hasundutan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan, perwujudan keterpaduan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten serta keserasian antarsektor di Kawasan Danau Toba. Dalam rangka itu pula pemerintah telah membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang terbit tanggal 1 Juni 2016. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu dari tujuh kabupaten di Kawasan Danau Toba yang menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) sehingga kabupaten ini diharapkan akan mencapai kemajuan dan transformasi dalam struktur ekonominya.

Selain menganalisis data PDRB, dapat juga dikaji berdasarkan data lapangan usaha untuk mengetahui perkembangan dan potensinya. Penelitian Purba dan Simamora (2016), misalnya, menganalisis data PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan beberapa data lainnya tahun 2010-2015 untuk tujuh kabupaten di seputar Danau Toba. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita, ternyata ketujuh kabupaten tersebut lebih sering sebagai "daerah relatif tertinggal", tidak terkecuali Kabupaten Humbang Hasundutan. Demikian juga berdasarkan kontribusi sektoral terhadap PDRB masing-masing, ketujuh kabupaten pun tidak mempunyai spesialisasi. Tentu banyak factor yang bisa menyebabkan hal tersebut, mungkin karena jumlah sektor unggulan di masing-masing kabupaten sangat sedikit.

Data Tabel 1 merupakan tiga indicator dari berbagai indicator yang dapat menunjukkan tentang ketinggalan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Selain dalam PDRB per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang selalu di bawah provinsi, termasuk juga dalam laju pertumbuhan ekonomi, kecuali tahun 2014-2015. Berdasarkan ketiga indicator tersebut, kabupaten ini tidak lebih baik dibandingkan dengan wilayah referensinya. Sjafrizal (2018: 221) mengatakan bahwa: "Potensi ekonomi sektoral adalah bersifat relatif yaitu dengan membandingkan kondisi rata-rata sektor yang sama pada daerah lain yang berkaitan". Hal ini juga merupakan salah satu indikasi bahwa potensi ekonomi sektoral

Kabupaten Humbang Hasundutan lebih rendah dibandingkan dengan potensi ekonomi sektoral provinsi. Hal inilah yang merupakan factor penarik untuk memilih kabupaten tersebut menjadi objek penelitian dan hasilnya disajikan dalam artikel ini.

**Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita dan IPM
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013-2018**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB per Kapita (Rp.000)*	IPM
2013	5,79 (6,08)	20.596,07 (34.599,95)	64,92 (68,36)
2014	5,30 (5,23)	22.373,03 (37.913,90)	65,59 (68,87)
2015	5,24 (5,10)	24.117,03 (41.019,54)	66,03 (69,51)
2016	5,02 (5,18)	25.828,99 (44.557,76)	66,56 (70,00)
2017	5,07 (5,12)	27.449,46 (47.963,99)	67,30 (70,57)
2018	5,04 (5,18)	29.306,84 (51.416,76)	67,96 (71,18)

*atas dasar harga berlaku

Angka dalam kurung adalah data Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2018: 418-423; 431; 436.

Jadi potensi ekonomi semua lapangan usaha Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diketahui supaya pemerintah daerah dapat memberi perhatian untuk mendorong pengembangan lapangan usaha yang memiliki potensi baik dan sekaligus untuk memberi perhatian yang wajar pula bagi lapangan usaha lainnya. Dengan demikian pembangunan yang terjadi dapat berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat dan mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain, bukan hanya meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya, tetapi juga PDRB per kapita, IPM dan indikator makroekonomi lainnya. Untuk itu perlu dianalisis bagaimana potensi masing-masing lapangan usaha Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2010 - 2018. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat, bukan hanya memperkaya kanzah analisis ekonomi regional tetapi juga untuk memperkaya materi kuliah khususnya mata kuliah Ekonomi Regional dan Seminar Ekonomi di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

METODOLOGI PENELITIAN

Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan sebagai daerah penelitian atas beberapa pertimbangan. Pertama, berdasarkan penelitian Purba (2014) menggunakan data 2003-2011, kontribusi kabupaten ini terhadap PDRB Sumatera Utara berada dibawah 3 kabupaten lain yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga perlu dianalisis potensi ekonomi sektoral. Kedua, kabupaten ini masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian sehingga belum menunjukkan adanya transformasi structural. Ketiga, kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kawasan Strategis Nasional. Keempat, berdasarkan penelitian Purba dan Avani (2018) menggunakan data 2013-2016 terdapat empat lapangan usaha yang tergolong sector unggulan di kabupaten ini, lebih banyak dibandingkan dengan enam kabupaten lainnya dalam KSN. Kelima, data yang dianalisis tersedia dan mudah diperoleh.

Data yang dianalisis adalah data sekunder, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data PDRB sektoral tahun 2010-2018. Data ini meliputi 17 kategori lapangan usaha sehingga hasilnya lebih valid bila dibandingkan dengan menggunakan data 9 kategori lapangan usaha.

Menurut Sjafrizal (2018: 229) ada tiga alat analisis untuk menentukan potensi ekonomi sektoral suatu daerah yaitu : (1) analisis *location quotient* (LQ), (2) laju pertumbuhan sektoral, dan (3) kontribusi sektoral. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya dua yang dipilih sedangkan laju pertumbuhan sektoral diganti dengan kontribusi sektoral terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten yang dianalisis. Dengan demikian alat analisis yang digunakan adalah : (1) analisis LQ, (2) kontribusi sektoral, dan (3) kontribusi sektoral terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Penjelasan ketiga alat analisis dan kriteria penentuan potensi ekonomi sektoral adalah sebagai berikut.

1. Metode *Location Quotient* (LQ)

Metode ini digunakan untuk menentukan ada tidaknya sector basis dari 17 lapangan usaha yang dianalisis setiap tahun. Formulasi penghitungannya mengikuti notasi Purba (2018; 2019) yaitu:

$$LQ_i = \frac{PDRB_{is} / PDRB_s}{PDRB_{ir} / PDRB_r} \dots\dots\dots (1)$$

dimana $PDRB_{is}$ adalah PDRB lapangan usaha ke-i kabupaten, $PDRB_s$ adalah PDRB kabupaten, $PDRB_{ir}$ adalah PDRB lapangan usaha yang sama wilayah referensi, dan $PDRB_r$ adalah PDRB wilayah referensi. Apabila $LQ_i > 1$, lapangan usaha tersebut dinamakan sector basis dan jika lebih kecil dari satu dinamakan sector bukan basis (Kuncoro, 2004; Adisasmita, 2005; Sjafrizal, 2008; Purba 2018). Setiap sector basis dianggap memiliki tingkat spesialisasi yang lebih tinggi sehingga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama di tingkat provinsi. Jadi semakin besar nilai LQ berarti semakin besar

keunggulan komparatif lapangan usaha tersebut. Sebaliknya bila $LQ_i < 1$ berarti tingkat spesialisasi lapangan usaha tersebut lebih kecil sehingga tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan lapangan usaha yang sama pada tingkat provinsi.

2. Kontribusi Sektoral

Untuk menghitung kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun digunakan formulasi berikut:

$$E_i = \frac{PDRB_i}{PDRB} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

dimana E_i menyatakan kontribusi lapangan usaha ke-i, $PDRB_i$ adalah PDRB lapangan usaha ke-i dan PDRB adalah PDRB kabupaten. Semakin tinggi kontribusi suatu lapangan usaha terhadap PDRB berarti semakin penting peranan lapangan usaha tersebut bagi perekonomian kabupaten.

3. Kontribusi Sektoral Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Untuk menghitung kontribusi suatu lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun digunakan formulasi sebagai berikut:

$$SPE_i = g_i \times E_i \dots\dots\dots (3)$$

di mana SPE_i adalah laju pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari lapangan usaha ke-i, g_i adalah laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha ke-i, dan E_i adalah kontribusi lapangan usaha ke-i terhadap PDRB kabupaten. Jadi berdasarkan rumus (3) di atas, besar kecilnya kontribusi suatu lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten ditentukan oleh besar kecilnya kontribusi sektoral terhadap PDRB dengan laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha tersebut. Semakin besar laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral maka kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten akan semakin tinggi juga.

4. Kriteria Menentukan Potensi Ekonomi Sektoral

Kriteria penentuan potensi ekonomi sektoral berdasarkan kuosien lokasi (LQ), kontribusi sektoral terhadap PDRB dan kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi disajikan dalam Tabel 2. Klasifikasi potensi dibedakan atas 3 bagian, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Potensi Ekonomi Sektoral

Klasifikasi Potensi Ekonomi	Kuosien Lokasi (LQ)	Kontribusi thp PDRB (%)	Kontribusi thp Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tinggi	> 2,00	> 15,00	> 1,00

Sedang	1,00 – 1,99	5,00 – 15,00	0,50 – 1,00
Rendah	< 1,00	< 5,00	< 0,50

Sumber: diadopsi dari Sjafrizal, 2018 dengan penyesuaian.

Karena data PDRB sektoral yang dianalisis berupa data *time series* dan kuosien lokasi (LQ), kontribusi terhadap PDRB dan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten tidak mengalami perubahan yang ekstrim dari satu tahun ke tahun lainnya, sehingga ukuran kuantitatif potensi ekonomi sektoral tersebut didasarkan atas nilai rata-rata tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kuosien Lokasi (LQ) dan Interpretasinya

Berdasarkan analisis data, dari 4 sektor basis hanya 3 yang konsisten, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) penyedia akomodasi dan makan minum serta (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sedangkan (4) konstruksi pernah tergolong sebagai sector non basis tahun 2013-2014. Lapangan usaha yang mempunyai LQ paling tinggi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata 3,18 dan terendah adalah konstruksi dengan LQ rata-rata 1,03 (Tabel 3). Keempat lapangan usaha tersebut mempunyai potensi ekspor dalam perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 3. LQ Sektoral Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 - 2018

Kategori Lapangan Usaha	Tahun									Rerata LQ
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2,01
2	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,48
3	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,08
4	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,58
5	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,71
6	B	B	B	Nb	Nb	B	B	B	B	1,03
7	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,81
8	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,50
9	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,38
10	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,44
11	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,37
12	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,60
13	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,14
14	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,18
15	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,51
16	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,70

17	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	0,27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

B = Sektor basis, Nb = Sektor bukan basis

Keterangan: 1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2 pertambangan dan penggalian; 3 industri pengolahan; 4 pengadaan listrik dan gas; 5 pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 6 konstruksi; 7 perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 8 transportasi dan pergudangan; 9 penyediaan akomodasi dan makan minum; 10 informasi dan komunikasi; 11 jasa keuangan asuransi; 12 real estate; 13 jasa perusahaan; 14 administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15 jasa pendidikan; 16 jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 17 jasa lainnya.

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).

Dalam terminologi ekonomi regional, produk sektor basis bukan hanya memenuhi kebutuhan setempat tetapi juga untuk dijual atau "diekspor" sehingga mendatangkan uang dari daerah lain atau luar negeri. Sektor basis inilah yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008; 2014; Purba, 2011; Tarigan, 2006; Adisasmita, 2005). Bertambahnya sector basis akan berdampak positif bagi sector *non* basis karena dapat meningkatkan permintaan lokal akan produk sector *non* basis tersebut. Dengan demikian sector *non* basis pun akan berkembang seiring dengan perkembangan sector basis.

Hasil analisis data *time series* bukan hanya memberi informasi tentang besarnya LQ berbagai lapangan usaha, tetapi juga konsisten sebagai sektor basis maupun *non* basis dari tahun ke tahun. Itulah sebabnya data *time series* memberikan informasi yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dalam hal ini tepat apa yang dikemukakan oleh Tarigan (2006 : 83) yang menyatakan bahwa: "analisis LQ... apabila digunakan dalam bentuk *one shot analysis*, manfaatnya juga tidak begitu besar.....akan tetapi, analisis LQ bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk *time series/trend*". Berikut ini adalah uraian singkat tentang keempat sektor basis Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan. LQ lapangan usaha ini menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil tetapi cenderung meningkat dari 1,94 tahun 2010 hingga 2,10 tahun 2018. Berdasarkan kuosien lokasi tersebut, keuntungan komparatifnya di tingkat provinsi cenderung meningkat, terutama tahun 2016-2018 dengan kuosien lokasi yang lebih besar dari 2,00. Lapangan usaha ini mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, dan perikanan. Hasil pertanian, kehutanan dan perikanan tentu ada yang dijual ke daerah lain sehingga mendatangkan arus uang ke kabupaten tersebut. Lapangan usaha tersebut menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja, bukan hanya di Kabupaten Humbang Hasundutan tetapi juga di tingkat provinsi. BPS berdasarkan data 2010-2014, menyebutkan sebagai berikut : "di Sumatera Utara, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja" (BPS, 2015: 62).

Kendatipun kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan menurun, namun kuosien lokasinya justru cenderung meningkat. Hal ini memberi sinyal bahwa potensi lapangan usaha ini tergolong tinggi, bukan hanya dalam kabupaten tersebut tetapi juga dalam perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Jadi pertanian, kehutanan dan perikanan masih memegang peranan penting bagi “ekspor” Kabupaten Humbang Hasundutan, baik ke kabupaten tetangga maupun kabupaten lain di luar batas provinsi. Singkatnya, LQ lapangan usaha yang cenderung meningkat menunjukkan potensi keuntungannya komparatifnya dalam tingkat provinsi semakin besar.

Bidang pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang tidak pernah ditinggalkan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini terekam dalam visi pemerintah daerah tahun 2016-2020, yang dirangkum dalam kata “HEBAT”, singkatan dari: H = Humbang Hasundutan *na mar Tuhan jala maduma* (peningkatan keimanan, kesejahteraan, dan kualitas SDM dan sumber daya alam), E = *eme na godang tano na bidang* (mewujudkan ketahanan pangan), B = *bahen mura arga ni pupuk* (penyediaan saprodi dan alsintan), A = *asa sinur na pinahan, bage na niula* (peningkatan ekonomi kerakyatan), T = *ture dalam tu huta sahat tu balian asa langku na niula dohot tigatiga* (peningkatan kualitas infrastruktur). Visi ini diwujudkan melalui misi nomor urut 4 yakni “meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan” yang diperkuat dengan motto bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja serius. Jadi walaupun lapangan usaha ini tergolong sektor primer, namun akan tetap bertahan atau akan bergeser sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang akan datang.

Konstruksi. Lapangan usaha ini menempati urutan keempat. Nilai LQ menurun dari 1,05 tahun 2010 menjadi 1,04 tahun 2018 dan rata-ratanya adalah 1,03 sehingga masih mempunyai potensi “ekspor” yang akan mendatangkan uang dari daerah lain. Lapangan usaha ini juga tidak terlepas dari visi pemerintah karena menyangkut peningkatan kualitas infrastruktur yang didukung dengan misi nomor urut 5, yakni “meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah”.

Penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha ini menempati urutan ketiga dimana LQ meningkat dari 1,39 tahun 2010 menjadi 1,43 tahun 2018 dengan rata-rata 1,38 per tahun. Lapangan usaha ini konsisten sebagai sector basis sepanjang tahun pengamatan. Kontribusi lapangan usaha ini diperkirakan akan terus meningkat beriringan dengan lapangan usaha lain yang turut mendukung peningkatan industri pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan secara khusus dan kawasan Danau Toba secara umum.

Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Lapangan usaha ini pun konsisten sebagai sector basis sepanjang tahun analisis data. Memang angkanya fluktuatif antara 3,11 hingga 3,23 sehingga rata-ratanya 3,18 per tahun dan berada dalam urutan paling tinggi. Lapangan usaha jasa ini tidak

mungkin “mengeksport” jasa, tetapi diperkirakan menyediakan jasa-jasa pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat meliputi administrasi pemerintahan, pertahanan, dan juga jaminan sosial wajib, yang peruntukannya bagi warga Kabupaten Humbang Hasundutan secara keseluruhan dan juga bagi warga kabupaten atau kota lain yang berurusan di kabupaten tersebut. Selain itu karena adanya peningkatan pelayanan dalam lapangan usaha tersebut sehingga memiliki keunggulan komparatif dalam tingkat provinsi.

2. Analisis Kontribusi Sektoral

Sebenarnya analisis ini menunjukkan bagaimana struktur perekonomian dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB. Hasil analisis ini sekaligus menggambarkan ada tidaknya transformasi struktur dalam perekonomian daerah. Terkait dengan transformasi struktural dimaksud, biasanya lapangan usaha digolongkan atas 3 bagian besar, yaitu: (1) sektor primer meliputi 2 lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian, (2) sektor sekunder meliputi 3 lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas serta konstruksi, (3) sektor tersier meliputi lapangan usaha lainnya, yaitu jasa-jasa (BPS, 2011: 8). Untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan, disajikan data dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 –2018

Kategori Lapangan Usaha	Tahun									Rerata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	50,13	49,20	48,53	48,13	46,94	46,06	45,46	44,44	44,00	46,99
2.	0,52	0,57	0,58	0,60	0,59	0,60	0,62	0,61	0,61	0,590
3.	1,64	1,65	1,66	1,57	1,57	1,57	1,56	1,59	1,59	1,60
4.	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6.	12,25	12,46	12,60	12,82	13,26	13,94	13,76	14,19	14,49	13,31
7.	13,11	13,30	13,48	13,54	13,88	13,95	14,47	14,84	15,04	13,96
8.	2,20	2,26	2,22	2,38	2,44	2,45	2,52	2,50	2,47	2,38
9.	2,91	2,86	2,98	3,13	3,20	3,22	3,25	3,38	3,40	3,15
10.	1,05	1,01	0,96	0,92	0,89	0,86	0,86	0,85	0,84	0,92
11.	1,18	1,16	1,20	1,18	1,16	1,16	1,18	1,18	1,18	1,17
12.	2,34	2,42	2,34	2,49	2,61	2,62	2,85	2,98	3,05	2,63
13.	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13
14.	10,70	11,15	11,47	11,29	11,46	11,60	11,45	11,39	11,30	11,31
15.	0,98	0,99	0,97	0,96	0,97	0,95	0,97	0,98	0,97	0,97
16.	0,57	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62	0,64	0,64	0,61
17.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	1,14

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).

Berdasarkan kontribusinya, ada 4 kontributor terbesar terhadap PDRB, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (3) konstruksi, (4) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, masing-masing di atas 10%. Peranan pertanian, kehutanan dan perikanan masih sangat penting karena merupakan kontributor terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan dengan kontribusi di atas 40 persen. Kontribusi yang besar ini menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar juga. Apabila pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan menunjukkan kecenderungan menurun maka konstruksi sebagai kontributor tertinggi ketiga dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai kontributor tertinggi kedua justru menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dan kontributor tertinggi keempat adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sebaliknya, industri pengolahan belum menunjukkan peranan yang besar dalam perekonomian, hanya dibawah 2 persen per tahun dan bahkan mengalami *deindustrialisasi* dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB yang cenderung menurun.

Apabila kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan digabung dengan pertambangan dan penggalian, nyatalah bahwa kontribusi sector primer tersebut masih sangat dominan terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi kabupaten tersebut masih bersifat agraris. Mengamati BPS Kabupaten Humbang Hasundutan menyebut sebagai berikut: "Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan semakin bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya" (BPS, 2015 : 56), namun kontribusi sektor primer, masih sangat dominan sehingga struktur ekonominya masih bersifat agraris. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Sjafrizal (2014: 155) yang menyatakan sebagai berikut: "seandainya dari hasil perhitungan ternyata kontribusi sektor pertanian adalah yang paling tinggi (*dominan*), ini berarti bahwa struktur ekonomi daerah tersebut masih bersifat agraris (*tradisional*)".

Struktur perekonomian yang demikian juga menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan yang yang belum cukup tinggi. Alasannya ialah karena sektor pertanian masih sangat dominan, lebih dari empat puluh kali lipat dibandingkan dengan kontribusi industri pengolahan yang berarti kabupaten ini masih berbasis pertanian. Hal ini sejalan dengan pandangan Sjafrizal (2014: 154) yang menyatakan bahwa: "suatu perekonomian dikatakan sudah maju bilamana kontribusi sektor industri sudah lebih tinggi dari sektor pertanian". Data menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan sangat rendah, yakni dari 1,64 persen tahun 2010 menjadi 1,59 persen tahun 2018 atau rata-rata sebesar 1,60 persen per tahun sepanjang tahun 2010-2018.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan. Lapangan usaha ini mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, dan perikanan. Hasil pertanian, kehutanan dan perikanan tentu ada yang dijual ke daerah lain sehingga mendatangkan arus uang ke kabupaten tersebut. Selain kontribusinya terhadap PDRB, juga merupakan andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Tampaknya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih dominan di semua kecamatan di kabupaten tersebut. Walaupun kontribusi sektor tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun, yakni 50,13 persen tahun 2010 menjadi 44,00 persen tahun 2018 namun masih tetap dominan dengan rata-rata 46,99 persen setiap tahun. Kalau dilihat dari nilai nominalnya, PDRB lapangan usaha ini memang meningkat, namun secara relatif menunjukkan penurunan. Hal ini tentu disebabkan laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha ini lebih rendah dari laju pertumbuhan berbagai lapangan usaha lainnya.

Konstruksi. Kontribusi lapangan usaha ini cenderung meningkat, yaitu dari 12,25 persen tahun 2010 menjadi 14,49 persen tahun 2018 atau rata-rata 13,31 persen per tahun. Lapangan usaha ini adalah kontributor tertinggi ketiga dibawah perdagangan besar dan eceran, reoperasi mobil dan sepeda motor. Pembangunan yang tampak semakin berkembang bukan hanya di ibukota kabupaten tetapi juga di sejumlah ibukota kecamatan dan wilayah lain yang memiliki objek-objek wisata sehingga kontribusi lapangan usaha ini diperkirakan akan terus meningkat beriring bersamaan dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reoperasi mobil dan sepeda motor.

Perdagangan besar dan eceran, reoperasi mobil dan sepeda motor. Data menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha ini terus meningkat, yaitu dari 13,11 persen tahun 2010 menjadi 15,04 persen tahun 2018 dengan rata-rata 13,96 persen per tahun dan menjadi kontributor kedua tertinggi. Walaupun tidak tergolong sebagai sektor basis, yang berarti tidak "mengeksport" produknya ke daerah lain, namun ada tidaknya geliat ekonomi ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Humbang Hasundutan. Doloksanggul sebagai ibukota kabupaten sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi kabupaten sudah bergerak menjadi kota yang setiap hari menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Selain itu banyaknya objek wisata yang didatangi para pengunjung, baik dari dalam kabupaten maupun dari kabupaten atau kota lain turut mendorong geliat ekonomi dan aktivitas perdagangan yang terjadi. Bahkan keberadaan bandara internasional Sisingamangaraja XII di Silangit diperkirakan turut memberi dampak positif karena aksesibilitas bukan hanya dari jalur darat lagi tetapi juga melalui jalur udara yang memungkinkan jumlah pengunjung bisa

bertambah banyak, mulai dari kunjungan seharian hingga beberapa hari. Jadi lapangan usaha ini diperkirakan akan terus meningkat kontribusinya, beriringan dengan lapangan usaha lain yang turut mendukung peningkatan industri pariwisata di seputar Danau Toba.

Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kontribusi lapangan usaha ini cenderung meningkat, dari 13,11 persen tahun 2010 menjadi 15,04 persen tahun 2018 dengan rata-rata 11,31 persen per tahun dan berada di urutan keempat tertinggi. Sebagai sektor jasa, lapangan usaha ini menyediakan jasa-jasa pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan juga jaminan sosial wajib, yang peruntukannya bagi warga Kabupaten Humbang Hasundutan dan juga bagi warga kabupaten atau kota yang berurusan di kabupaten tersebut. Sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka jasa-jasa pemerintahan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten akan semakin meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,82 persen per tahun sepanjang tahun analisis data. Diperkirakan kontribusi lapangan usaha ini pun akan meningkat seiring dengan waktu.

3. Analisis Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data, kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan pada umumnya lebih kecil dari satu persen, kecuali dua lapangan usaha: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan serta (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Data Tabel 5 menunjukkan kontribusi tersebut dalam kurun waktu 2011-2018.

Tabel 5. Kontribusi Sektoral Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2018

Kategori Lapangan Usaha	Tahun									Rerata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	-	1,85	2,00	2,50	1,67	2,10	1,53	1,76	1,85	1,91
2	-	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04
3	-	0,05	0,12	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07
4	-	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,94	0,82	0,86	1,26	0,48	1,00	0,91	0,89	0,90
7	-	0,91	1,15	1,00	0,97	0,66	1,23	1,08	1,02	1,00
8	-	0,18	0,17	0,19	0,15	0,13	0,15	0,17	0,13	0,16
9	-	0,17	0,24	0,26	0,19	0,19	0,24	0,21	0,22	0,21
10	-	0,09	0,05	0,07	0,07	0,04	0,06	0,05	0,05	0,06
11	-	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06

12	-	0,17	0,18	0,19	0,18	0,14	0,28	0,23	0,22	0,20
13	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14	-	0,69	0,63	0,42	0,81	0,66	0,36	0,36	0,41	0,54
15	-	0,08	0,05	0,07	0,06	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05
16	-	0,05	0,05	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04
17	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).

Hanya ada dua lapangan usaha yang mempunyai kontribusi tertinggi, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 1,91 persen dan (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, mencapai 1,00 persen. Kontributor paling kecil adalah: (1) pengadaan listrik dan gas, (2) jasa perusahaan, dan (3) jasa lainnya, masing-masing sekitar 0,01 persen (angka yang dibulatkan).

4. Analisis Potensi Ekonomi Sektoral

Kriteria menentukan potensi ekonomi suatu lapangan usaha didasarkan atas tiga indikator yaitu: (1) LQ, (2) kontribusi terhadap PDRB dan (3) kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya masing-masing lapangan usaha ditempatkan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kriteria Penilaian Potensi Ekonomi Sektoral

Klasifikasi Potensi Ekonomi	Rerata kuosien lokasi (LQ)	Rerata kontribusi thp PDRB (%)	Rerata kontribusi thp laju pertumbuhan ekonomi (%)
Tinggi	> 2,00	> 15,00	> 1,00
	LU 1 LU 14	LU 1	LU 1
Sedang	1,00 - 2,00	5,00 - 10,00	0,50 - 1,00
	LU 6 LU 9	LU 6 LU 7 LU 14	LU 6 LU 7 LU 14
	< 1,00	< 5,00	< 0,50
Rendah	LU 2 LU 3 LU 4 LU 5 LU 7 LU 8 LU 10 LU 11 LU 12 LU 13	LU 2 LU 3 LU 4 LU 5 LU 8 LU 9 LU 10 LU 11 LU 12 LU 13	LU 2 LU 3 LU 4 LU 5 LU 8 LU 9 LU 10 LU 11 LU 12 LU 13

	LU 15	LU 15	LU 15
	LU 16	LU 16	LU 16
	LU 17	LU 17	LU 17

LU menyatakan lapangan usaha

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).

Berdasarkan data Tabel 6, hanya satu lapangan usaha yang mempunyai potensi tinggi, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya 2 yang mempunyai potensi sedang, yaitu: (1) konstruksi dan (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sementara itu perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor masih tergolong rendah karena masih tergolong sektor *non* basis. Demikian pula halnya dengan penyediaan akomodasi dan makan minum tergolong berpotensi rendah walaupun sudah tergolong sektor basis tetapi kontribusi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong dalam kelompok rendah. Dengan demikian terdapat 14 lapangan usaha yang mempunyai potensi rendah (Tabel 7).

Tabel 7. Potensi Ekonomi Lapangan Usaha Kabupaten Humbang Hasundutan

No.	Kategori Lapangan Usaha	Potensi Ekonomi
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Tinggi
2.	Pertambangan dan Penggalian	Rendah
3.	Industri Pengolahan	Rendah
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	Rendah
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rendah
6.	Konstruksi	Sedang
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	Rendah
8.	Transportasi dan Pergudangan	Rendah
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rendah
10.	Informasi dan Komunikasi	Rendah
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rendah
12.	Real Estat	Rendah
13.	Jasa Perusahaan	Rendah
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Sedang
15.	Jasa Pendidikan	Rendah
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rendah
17.	Jasa Lainnya	Rendah

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2019 (Laporan Penelitian).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data 2001 - 2018, hanya satu lapangan usaha yang berpotensi tinggi, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan serta dua berpotensi sedang, yakni (1) konstruksi dan (2) administrasi

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sisanya berpotensi rendah. Namun seiring dengan waktu ditambah dengan program pemerintah daerah serta program pemerintah pusat dengan membentuk Badan Otoritas Danau Toba (BODT) akan memberikan dampak positif bagi perekonomian kabupaten yang ada di seputar Danau Toba, tidak terkecuali Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagai destinasi wisata nasional dan internasional, sejumlah lapangan usaha yang diperkirakan memperoleh dampak positif dari destinasi wisata antara lain: (1) penyedia akomodasi dan makan minum, (2) perdagangan besar dan eceran, (3) transportasi, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) konstruksi. Lapangan usaha tersebut mungkin akan bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya sehingga kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi dapat berubah. Namun demikian diperkirakan pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tetap memiliki potensi yang tinggi dalam beberapa dasawarsa ke depan apalagi Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan sebagai salah satu *food estate* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo, 2008, *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPS, 2011, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 2006-2010*.
- BPS, 2015, *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Humbang Hasundutan, 2010-2014*.
- BPS, 2019, *Kabupaten Samosir Dalam Angka 2018*.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang *Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2016 tentang *Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba*.
- Purba, Elvis F., 2011, *Modul Ekonomi Regional*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Purba, Elvis F., 2014, "Kabupaten Tapanuli Utara dan Pemekarannya: Beberapa Perbandingan Data Makroekonomi Regional". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nommensen* Vol. V No. 2 Juli, hal. 1-14.
- Purba, Elvis F. dan Simamora, Bosur Samuelson, 2016, *Perbandingan Indikator Makroekonomi Tujuh Kabupaten di Kawasan Danau Toba Sebelum Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN)*. Laporan Hasil Penelitian. Medan: LPPM Universitas HKBP Nommensen.
- Purba, Elvis F. dan Avani, 2018, "Analisis Sektor Unggulan Tujuh Kabupaten di kawasan Strategis Nasional Danau Toba Periode 2010-2016" dalam *VIS* Volume 26 Nomor 2 Juni, hal. 3521-3532.
- Purba, Elvis F. dan Siregar, Ayu, 2019, *Tipe Daerah dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara, 2001-2018*. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.

- Purba, Elvis F., dan Hutabarat, Ellia Sarah, 2019, *Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010-2018*. Laporan Hasil Penelitian. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen.
- Sjafrizal, 2008, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjafrizal, 2018, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono, 2014, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Tambunan, Tulus T.H., 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson, 2006, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.